

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana diketahui memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional, pemerintah melakukan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan program pembangunan nasional tentunya dibutuhkan dana yang cukup besar. Pemerintah mengandalkan sektor migas sebagai sumber dana pembangunan. Setelah *tax reform*, pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama pembangunan.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu sumber pendapatan dari dalam negeri yang potensial untuk terus digali dan dikembangkan adalah dari sektor pajak daerah. Menurut Soemarno (2007: 626) Pajak daerah merupakan,

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, salah satu potensi pajak daerah terbesar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor khususnya roda dua. Kemajuan teknologi mengubah standar kebutuhan

sekunder menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Kendaraan menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Tercatat data peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama empat tahun terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Jenis Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017

**PERKEMBANGAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN JOMBANG
(Dalam Satuan Unit)**

No	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Sedan dan sejenisnya	2.996	3.121	3.243	3.295
2.	Jeep dan sejenisnya	1.723	1.837	1.980	2.153
3.	Station dan sejenisnya	18.742	21.703	23.756	26.349
4.	Bus dan sejenisnya	686	743	828	889
5.	Truck dan sejenisnya	12.915	13.902	14.655	15.292
6.	Sepeda motor	430.693	489.133	492.044	508.010
7.	Alat berat	52	52	52	52
Jumlah		467.807	530.491	536.558	556.040

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran sumber daya manusia dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah demi terwujudnya pembangunan nasional.

Pemerintah harus terus meningkatkan penggalan penerimaan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan turut serta melakukan pembinaan, membentuk satuan tugas khusus, koordinasi dan kerja sama dengan dinas terkait dimana dalam hal ini adalah Kantor Bersama SAMSAT, Badan Pendapatan Daerah dan PT Jasa Raharja (Persero). Tidak kalah penting juga diperlukan sebuah cara yakni intensifikasi pajak.

Menurut Dendi (2015) Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan menggali penerimaan pajak oleh subjek dan objek pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi pajak daerah.

Ruang lingkup penerapan intensifikasi pajak daerah antara lain yaitu dengan memberi penyuluhan terkait pembayaran administrasi pajak daerah, penambahan unit-unit pembantu, serta dengan peningkatan mutu petugas pelayanan pembayaran pajak daerah. Intensifikasi pajak berguna untuk meningkatkan realisasi pemasukan pajak.

Menurut Sumitro (dalam Gupita : 2013) ‘Upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan Penyempurnaan administrasi pajak, Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan Penyempurnaan undang-undang pajak’.

Cara yang dapat diterapkan di Kabupaten Jombang adalah dengan cara penyuluhan kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor, diterapkannya

koordinasi yang baik antara pihak yang terkait, serta peningkatan mutu pegawai pemungut pajak berupa kerja keras, kreatifitas, inovasi dan kompetensi dari aparat pajak.

Dilakukannya pengetahuan pentingnya taat pajak kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor diimbangi dengan adanya sebuah kebijakan atau program seperti inovasi-inovasi yang telah dibentuk oleh personel Tim Pembina SAMSAT dalam pelayanan publik dengan membuat beberapa terobosan yang dapat terkoneksi dengan berbagai layanan yang sudah ada di Kantor Bersama SAMSAT. Misalnya dengan perubahan berbasis kertas menjadi *paperless*, pembayaran non tunai, *smartcard*, *e-smart* dan *auto debet*.

Selain itu Tim Pembina SAMSAT Jawa Timur pernah mengusulkan tiga inovasi untuk mengikuti lomba Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga inovasi tersebut yaitu layanan kolaborasi *e-samsat* dengan PT Pos Indonesia atau dengan nama lain Pesat POSINDO, SAMSAT *Home Care* atau yang disingkat SAMSAT HORE dan SAMSAT Jujuk Desa atau SAMSAT JUDES. Ketiga inovasi ini mengarah kepada model pelayanan teknologi informasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Jawa Timur beberapa tahun terakhir mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Timur Jombang. Data peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten Jombang dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Jombang tahun 2014-2017

**JUMLAH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN JOMBANG
(Berdasarkan Realisasi dalam Rupiah)**

Jenis Kendaraan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Sedan dan sejenisnya	3.485.308.000	4.144.242.625	4.726.136.400	4.612.520.250
Jeep dan sejenisnya	2.880.070.875	3.510.509.250	4.495.835.650	5.382.870.100
Station dan sejenisnya	25.373.427.175	30.379.963.950	37.883.409.550	43.871.898.450
Bus dan sejenisnya	816.968.200	974.655.625	1.302.257.650	1.479.062.200
Truck dan sejenisnya	14.212.564.000	17.004.725.150	19.106.953.725	21.926.329.650
Sepeda motor	76.614.094.363	91.863.349.626	101.893.085.538	111.299.230.575
Alat berat	20.397.200	19.992.700	8.810.200	18.094.150
Jumlah	123.402.829.813	147.897.438.926	169.416.488.713	188.590.005.375

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang

Dari tabel 1.2 dapat di uraikan bahwa, pada tahun 2014, potensi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 123,4 milyar dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 103,08 milyar dari target Rp 98,95 milyar atau sebesar 104,18

persen dari target yang ditentukan. Tahun 2015 tercatat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 116,07 milyar dari target Rp 113,5 milyar atau meningkat 102,2 persen dari target dengan potensi penerimaan sebesar 147,8 milyar. Pada tahun 2016 tercatat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jombang sebesar Rp 127,2 milyar atau mencapai 107,2 persen dari target yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 118,65 milyar dengan potensi sebesar 169,4 milyar. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat potensi penerimaan sebesar 188,5 milyar dengan hasil realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 139,46 milyar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 121,35 milyar atau meningkat sebesar 114,9 persen.

Target dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat terus meningkat seiring dengan kebutuhan. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah dengan adanya penyuluhan dan pengetahuan kepada wajib pajak, serta pelayanan publik yang baik mampu meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jombang.

Dari uraian-uraian tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan intensifikasi pajak daerah dengan mengambil objek penelitian Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jombang. Alasan peneliti melakukan penelitian terkait penerapan intensifikasi pajak daerah dalam kaitannya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jombang adalah karena belum ada

penelitian terdahulu yang mengambil objek Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, peneliti melihat dari surat kabar bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Padahal hal ini berisiko terhadap wajib pajak ketika ada operasi penertiban pengguna jalan oleh Polisi lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, dengan berdasar pada penelitian terdahulu oleh Vanda,dkk (Jurnal Penelitian UNS, 2014: 284-298) dengan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan penelitian bahwa implmentasi pemungutan pajak parkir dilakukan dengan pendataan wajib pajak yang belum terdaftar, pemeriksaan dan pengawasan wajib pajak, dan pemungutan wajib pajak melalui sistem jemput bola.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak adalah dengan cara perluasan basis penerimaan, melakukan pengawasan serta memperbaiki administrasi. Serta mengacu pada penelitian terdahulu oleh Christiver (Jurnal EMBA, 2016 :1241-1253) dengan metode penelitian asosiatif kuantitatif yang menghasilkan penelitian jika hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman ekstentifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus dalam penerimaan pajak.

Dengan demikian, dari kedua penelitian terdahulu tersebut peneliti mengangkat topik penelitian yang berjudul **“INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, target pajak harus terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dari rumusan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian, bagaimana intensifikasi pajak daerah mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini dimaksud untuk memperoleh data dan informasi yang sebenarnya mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jombang. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah upaya intensifikasi pajak daerah mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akademik maupun ilmu keseharian bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi penulis

Manfaat yang bisa diambil oleh penulis yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi negara guna meningkatkan pembangunan nasional. Sehingga penulis dapat mengapresiasi pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka terbentuknya kesadaran dalam pembayaran pajak.

2. Bagi Pemerintah

Manfaat yang bisa diperoleh bagi pemerintah yaitu sebagai salah satu acuan untuk memahami pentingnya pajakan. Agar terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak demi terwujudnya pembangunan nasional.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat yaitu sebagai pedoman dalam memahami kehidupan sosial yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi semata, namun juga mampu memberikan kontribusi bagi negara berupa kepedulian akan pembangunan nasional melalui taat pembayaran pajak.